Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Jumal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan *(Maret, Juni， September dan Desember)* diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakatpemerhati hukum pada umumnya.

Pembina
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HakAsasi Manusia

Pengarah
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala PusatPenelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan HakAsasi Manusia
KepalaPusatPengkajiandanPengembangan Kebijakan

PemimpinUmum
Henry Donald Lbn Toruan,S.H., M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Pemimpin Redaksi
AhyarAri Gayo, S.H., M.H.， APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi
Marulak Pardede, S.H., M.H., APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)
Nevey Varida Ariani, SH., M.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)
Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai)
Muhaimin, S.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana
Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretariat
M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P
Asmadi, S.H.

Tata Usaha
Dra. Evi Djuniarti, M.H.
Lindung Budi Mulyawan, S.H.
B. Lora Christyanti, S.IP.

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Harysandy Permana, S.Kom. (Teknologi Informasi)

Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
   Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret (Hukum Pidana)
2. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
   Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (Hukum Administrasi Negara, Hukum Konstitusi, Hukum Lingkungan)
3. Dhiana Puspitawati, S.H., L.LM., Ph.D.
   Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Hukum Laut Internasional)
4. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
   Fakultas Hukum Universitas Jember (Hukum Konstitusi)
5. Dr. Ridwan Nurdin, M.CL
   Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry (Hukum Islam)

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:

balitbangkumham@gmail.com

ejournaldejure@gmail. com

Percetakan PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 56(8)111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritisi, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuatmerupakanpendapatpribadipenulisnya, bukan pendapatredaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, dengan memperhatikan Pedoman Penulisan Naskah dan *di-submit* pada aplikasi *Open Jounal System (OJS)* pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI..... iii

ADVERTORIAL iv

KUMPULANABSTRAK vi

Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta -China: Studi Deskriptif Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara
(Legal Aspects of Government Policy Protecting State Industry Post-Condition Afta-China Regional Trade Descriptive Study of the Government of North Sumatra Province).....137-149
Halimatul Maryani Ritonga

Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana Pada Keadaan Semula
(Rehabilitation Problematick for Returning the Person Losing Their Position Back).....151-170
Mosgan Situmorang

Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana
(Notariary Responsibilities of Authentic Acts Are Indicated in Criminal Acts) 171-183
Teresia Din

Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan
(Justice Restorative in Settlement of Lighweight Crimes) 185-206
Muhaimin Muhaimin

Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
(The Implications of Indonesian Anty-Monopoly and Unfair Competition Law for Micro Small and Medium Entreprises (MSMEs).....207-215
Ayup Suran Ningsih

Mendudukkan Konsep *Executive Review* dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia
(Establish The Concept of The Executive Review in The Indonesian State Law System) 217-229
Taufik H. Simatupang

Mekanisme Pemungutan Suara *Absentee*: Upaya Perlindungan Hak Pemilih pada Saat Pemungutan Suara ((*Absentee Voting Mechanism: Protection Efforts of Voter Rights at The Time of Voting*).....231-246
Wulan Pri Handini

Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembuatan Akad Murabahah
(Protection Which is Balanced by Parties in the Making of Akad Murabahah) 247-257
Evi Djuniarti

BIODATA PENULIS.....

PEDOMAN PENULISAN.....

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadirat Allah SWT, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementeraian Hukum dan HAM RI bisa kembali menerbitkan Volume 19 Nomor 2 Juni 2019.

Penerbitan-penerbitan Jurnal Penelitian hukum De Jure Volume 19 Nomor 2 Juni 2019 ini, akan memuat 8 (Delapan tulisan) dari berbagai institusi lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Pesta Demokrasi tahun ini yang secara serempak juga memberikan ruang khusus dalam dimensi pemilian umum yang terjadi di Indonesia. Mekanisme pemungutan suara absente merupkan upaya perindungan hak pemilih pada saat pemungutan suara perlu mendapat perhatian khusus dalam pembuatan kebijakan, termasuk diantarannya pemilihan jabatan Publik misal BPK yang perlu ada perbandingan dibeberapa negara agar tidak menimbulkan *conflic of interest.*

Mekanisme Executive review terhadap produk perundang-undangan diharapkan semakin memperkuat bahwa perturan yang dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakan untuk dilaksanakan dalam rangka menjamin keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum. Dorongan dari dalam diri sendiri dan rangsangan dari luar harus segera diatasi untuk mencapai tujun Negara kita yaitu mencipkan masyarakat yang sejahterah adil dan makmur.

Berkaitan dengan hal tersebut, redaksi Jurnal Penelitian De Jure dalam Volume 19 Nomor 2 Juni 2019, mengangkat tulisan yaitu Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China (Studi Deskriptif Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara), Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang Yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula, Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana, *Restoratif Justice d*alam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan, Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Mekanisme Pemungutan Suara *Absentee*: Upaya Perlindungan Hak Pemilih pada Saat Pemungutan Suara, Mendudukkan Konsep *Executive Review* dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia, Perlindungan yang Seimbang Para Pihak Dalam Pembuatan Akad Murabahah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan hasil karyanya.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan dalam penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para Mitra Bestari yang telah bersedia membantu, memeriksa dan mengkoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Redaksi

Jakarta Juni 2019

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

HALAMAN KOSONG

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Halimatul Maryani Ritonga

Legal Aspect of Government Policy in Protecting Domestic Industry Following the Ratification of Afta China Regional Trade Treaty (Descriptive Study by the Administration of North Sumatra Province)

Law Research Journal De Jure, 2019 June, Volume 19, Number 2, Page 137-149

In principle, the basic concept of a free trade treaty is the removal of barriers in the international commerce process, but the legal issue in this research is that a free trade treaty, which at the multilateral system of the World Trade Organization, abbreviated as the WTO, level has experienced some restrictions and not go well in line with the expectations of the parties, may establish a regional trade block, for example ASEAN, AFTA, including the ACFTA aimed specifically to gain direct benefits from and to speed the economic growth on a regional scale in order to secure higher development and advancements level. The method used in this research is the juridical normative research method. The results of the research have been analyzed from January 1, 2010, when it was confirmed that China would join the Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) treaty, the Framework Agreement on comprehensive, Economic Co-operation Between the Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China (Asean-China) that was signed by the then President of the Republic of Indonesia, Megawati, in Phnom Penh, Cambodia on November 4, 2002, and ratified by President Decree No. 48 of 2004 by issuance of the Law No. 24 of 2000 regarding the International Treaty. Consequently, the legal basis for the applicability of the regional commerce treaty under the World Trade Organization or WTO is authorized under Article 24 of GATT, amid some policies implemented by the government in order to protect the domestic industries from the negative impact of regional free trade, in accordance with the principles of transparency, honesty and must be set under one single principle.

Keywords: government policy; regional trade; domestic industry.

Mosgan situmorang

Problems of ex-offenders Rehabilitation to reinstate Their Status

Law Research Journal De Jure, 2019 June, Volume 19, Number 2, Page 151-170

Rehabilitation in the context of criminal law is a fairly popular word. This word is used in particular in terms of reinstating the legal position or office of a person who has lost his/her position or office related to a crime, but often also used in the context of drug-related crimes, especially dealing with rehabilitation for the addicts. In the context of a citizen's right to regain his/her position, rehabilitation means reinstating a person so s/he could regain his/her original position or conditions. The word "position" in this case has a broad meaning, it may take the forms of a condition, or a position in an employment, status as a student, college etc.. Rehabilitation has been regulated in some laws, from the 1945's Constitution of the Republic of Indonesia and some other organic laws, such as the Justice Law, Criminal Procedure Code, Civil Servants Law, Government Regulation No. 27 of 1983 etc. Decision for rehabilitation may be granted to anyone who is in the investigation, prosecution or court instances when they are arrested, detained, prosecuted or tried without valid reason under the laws or due to misidentification or misapplication of the law. Decisions determining such rehabilitation issued by a judge must be further followed up by other authorities for effective realization of the rehabilitation. In practices, rehabilitation is often constrained, because someone's position or status has already been filled by someone else during the legal process, or the original state can no longer be reinstated to their prior conditions. Grounded on the description above, it is considered necessary to conduct this research. The formulation in this research is "why rehabilitation to the previous position or status is difficult to implement". The purpose of this research is to identify the obstacles in implementing the rehabilitations. This research may be used as a material within the scope of making policy and in order to improve the regulations related to rehabilitation. The method used in this research is normative juridical method. According to the results of this research, one may conclude that there are some, both regulatory and technical, constraints in the implementation of rehabilitation. Recommendation that may be given in this case is to issue regulations that take the form of technical guidelie for the implementation of the rehabilitation in order to enable all related parties to perform their respective roles.

Keywords: rehabilitation; to previous position.

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Teresia Din

Notary's Accountability To Crime-elated Authentic Deeds

Law Research Journal De Jure, 2019 June, Volume 19, Number 2, Page 171-183

Population growth and development have been so rapid, while the land area may be said relatively unchanged, this fact has rendered the demand for land to increase, which in turn, giving a raise to so many land-related problems. To prevent or at least reduce the potential conflict or dispute, the mechanism for transferring a title over a land, in order to enable the registration of the same, must be legalized by a Notary deed. The formulation of the problem in this research is the notary's responsibility, under the penal laws, for his position as a Public Officer in regard to the authentic deeds indicated as related to a crime? The research method employed in this research is normative juridical method. From the results of the research one may conclude that non-performance of the agreements in a deed, by means of a default of a Party, that may render the deed cancelled, is not the responsibility of the Notary, but of the parties who bind themselves to perform the obligations. This legal protection aspect for the Notary that in some extent relates to the criminal and civil law institutions is more external in nature, meaning that the Notary as a Public Officer has the privileges attached to their legal position/standing as a consequence of their assuming such office. The term Privileges in the laws is the special or specific rights conferred to a government or the ruler of a country and delegated to a person or group of people, in addition to the rights of the people commonly granted according to the applicable law. The privileges of a Notary should distinguish the treatment to a Notary from the treatment to the ordinary people. The forms of trhe treatment relate to special procedures in law enforcement against Notaries, i.e. related to the treatment in terms of summoning and examining the same during a process of investigation and trial, which must be highly observed

Keyword: notary public; authentic deed, criminal act.

Muhaimin

Restorative Justice in Settlement of Minor Offences

Law Research Journal De Jure, 2019 June, Volume 19, Number 2, Page 185-206

According to the apologists of justice values, the law has been moving quickly and turned to be more biting in legal cases related to the have-nots but hardly questioning the interests of the haves, including those in powers. A case that relates to or whose culprit is allegedly one of the haves or one in power, the law seems paralyzed and blunt. In addition to legal certainty and justice, a legal settlement must bring also beneficial values. The problem and challenge nowadays are how to realize a law enforcement process that is able to fulfill the legal objectives that are defined as a fair and beneficial legal certainty. The method used in this research is a descriptive analytical method with a normative juridical main approach. Criminal law must be improved in a policy-approach manner, as it is substantially a part of a policy or policy step (i.e. part of legal politics / law enforcement, criminal law politics, criminal politics and social politics). Criminal justice should not only be seen as a crime prevention system, but one should take the whole picture as a social problem that is eqal to the crime itself. The imposition of criminal sanctions should be connected to the human development policies aimed to shape a totally complete person of Indonesia. The criminal punishment imposed on an offender must be in accordance with the values of civilized society. In addition, the criminal punishment should be used to foster awareness to the offender on the human values and social values when living in the community at large, that put the deliberation to reach accord in priority and that has been an integral mechanism of settling problems in Indonesian communities. Legal reforms in Indonesia should not be separated from the objective conditions of the Indonesians who uphold the values of religious laws in addition to the traditional laws, hence it is necessary to produce legal products that observe and is rooted from the cultural, moral and religious values. Common criminal offences may be settled by penal mediation which is usually called the restorative justice approach, that focuses on immediate participation of perpetrators, victims and the public in understanding the offences. Restorative justice is also a new paradigm that may be employed in dealing with a crime for law enforcers and legal workers in Indonesia.

Keywords: restorative justic; minor offence; settlement.

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Ayup Suran Ningsih

Implication of Law No. 5 of 1999 Concerning Prohibition of Monopoly and Unfair Competition in Micro, Small and Medium Businesses (MSMEs)

Law Research Journal De Jure, 2019 June, Volume 19, Number 2, Page 207-215

The Law No. 5 of 1999 regarding Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition Practices (Anti Monopoly Law) is the basis of the Indonesian policies adopted for dealing with unfair business competition Indonesia. The Anti-Monopoly Law has a specific regulatory system in addressing the relationship between the business competition and small businesses. Business competition policies and laws in Indonesia highly favor the MSMEs. All actions of MSM Entrepreneurs are excluded by Article 50 letter h of Law No. 5 Year 1999. The law also prohibits large businesses from using their market powers in order to prevent the others (including the MSMEs) from doing businesses or other harmful practices. One of the objectives of this Law is to guarantee equal business opportunities for every entrepreneurs. The issues of this research are the consequences of the exemptions given to the small-scale business entrepreneurs, potential violations by MSM Entrepreneurs in terms of business competition, and how to monitor the MSM Entrepreneurs in other countries. The method used in this research is the socio-legal approach. This method is an empirical research and problem approach by observing the existing rules and theories and then relate them with the facts or facts prevailing in the industry (public). The results of this research indicate that exemptions to small business entrepreneurs must not be absolute while relevant institutions/authorities must always conduct the supervisions. Exemptions do not guarantee that small businesses will not cheat or be unfair in its business competition. The exemptions possess a positive impact, the increase in the number of MSM Entrepreneurs, while at the same time its negative impact has been that the exemptions prevent the MSM Entrepreneurs from developing into big business entrepreneurs. The MSM Entrepreneurs may also potentially commit violations in terms of business competition such as pricing, boycotts, territorial division, agreements with foreign parties, and secret agreements. Thailand is a country that can be used as an example in the development and supervision of its MSMEs. Thailand has a MSMEs development system, i.e. one tamboon one product. Thailand has also several institutions/authorities taking care of MSMEs such as the Office of Small and Medium Enterprises (OSMEP), the Institute for Small and Medium Enterprises Development (ISMED), Competition Commission, and special banks for MSMEs, in addition to the central and regional governments.

Keywords*: competition law; monopoly; unfair competition; implications of law no. 5 of 1999; MSMEs.*

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Taufik H. Simatupang

Establishing The Concept Of The Executive Review In The Indonesian Constitutional Law System

Law Research Journal De Jure, 2019 June, Volume 19, Number 2, Page 217-229

Laws and regulations that are not well organized will result only to many disharmonious and un-synchronous issues, both vertically and horizontally. This issue has raised the concept of the executive review as a solution. The problem is, which state institution who has the authorities. This research describes the legal aspects in the making of laws and regulations and the position of executive review in the Indonesian constitutional legal system. This normative juridical law research uses secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The legal aspects of making such laws and regulations must accommodate the philosophical, sociological and juridical foundations. Legal analysis and assessment are parts of significant examination concept of laws and regulations in the legal state constitutional system. Reviews are carried out by assessing whether or not the enacted and applicable laws and regulations have reached the purposes for which they are made, and at the same time to identify the benefits and impacts of the implementation of these legal norms to the society. The results are recommendations on what should be done to the laws and regulations, whether to amend, revoke or maintain them. In the Indonesian constitutional legal system, any reviews for cancellation of a law or regulation falls under the authority of the judicative institutions by means of judicial review mechanism. Therefore the legal assessment and analysis tasks within the context of laws and regulations reviews that may lead to recommendations whether to revoke, amend and maintain the same, should not be under the authority of the executive institution. As such authority may overlap and conflict with the duties and authorities of the judiciary authorities, both at the Constitutional Court level and the Supreme Court level. The government should emphasize more on exercising the regulatory supervision authority by means of enforcing the executive preview, the review on the legal norms before they are enacted and binding the public as a product of legislation.

Keywords: executive review concept; constitutional law system; Indonesia.

Wulan Pri Handini

Absentee voting mechanism: Protecting the voters' rights in election

Law Research Journal De Jure, 2019 June, Volume 19, Number 2, Page 231-246

Low public participation in elections has become a problem for Indonesia as a democratic country. This research deals with the forms of protection given to the Indonesians who could not afford to appear at a designated polling station in where they have been registered when they are about to vote. In addition, this research also explores the alternative voting rights protection for the citizens who cannot come to the designated polling stations in where they have been registered at the time of voting while they are in other countries. This research may be classified as a juridical-normative research, that refers to the legal norms in some regulations. This research also makes comparisons of the same issues in 9 (nine) countries. In this research one may conclude that the protection of the voting right in elections has in fact been guaranteed by the laws and regulations, as a constitutional right, in the Law Number 39 of 1999. Specifically in the regulation of legislative elections, both the Law No. 8 of 2012 and Law No. 7 of 2017, provide for alternative voting mechanism for anyone who cannot afford to come to the polling stations where they are registered at the time of the voting both for domestic and foreign voters. In solving this problem of voter absenteeism Indonesia has referred to the mechanism used in Germany that has been using early voting mechanism for the voters that, for some reasons, cannot come to the polling station where they are registered.

Keywords: absenteeism; elections; voting; people.

Jurnal Penelitian Hukum

De Jure

Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019

p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Evi Djuniarti

Balanced Protection for Parties to Murabahah (Islamic Financing) Agreement

Law Research Journal De Jure, 2019 June, Volume 19, Number 2, Page 247-257

The relationship of the parties established in a Murabahah financing agreements is a legal relationship that brings specific legal consequences. Islamic banks, in channeling funds to their customers, of course, will certainly not expect any losses from this legal relationship, and on the other hand, the customer may take advantages from the funds borrowed from the Islamic banks for their business purposes, such as expansion of product marketing, improvement of product quality, procuring equipments, working capital, and others. As a legal relationship that brings legal consequences, if either party, in particular the customer, turns to be unable to discharge its obligations, i.e. repaying the loan in a punctual manner and at the agreed upon amounts, it may give a rise to lawsuits by the Islamic bank. The Murabahah financing contract, that considers the financing as a form of buying and selling transaction, is a new thing in banking industry as it is not known to the conventional banking system. Bai 'al-murabahah is a good sale and purchase transaction at their original price plus additional agreed profits in baik al-murabahah, the seller must disclose the price of the product and set an amount as its profit.

Keywords : balanced protection; parties; murabahah laws.

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Halimatul Maryani Ritonga

Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China (Studi Deskriptif Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Volume 19, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 137-149

Pada prinsipnya konsep dasar perdagangan bebas merupakan penghilangan hambatan-hambatan dalam proses perdagangan internasional, namun yang menjadi isu hukum dalam kajian ini adalah bahwa suatu perdagangan bebas dalam skala sistem multilateral *World Trade Organization* disingkat dengan WTO sedikit terkendala dan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan harapan, sehingga mulailah suatu negara itu membentuk blok perdagangan secara regional misalnya ASEAN, AFTA, termasuk ACFTA yang bertujuan mendapatkan keuntungan secara langsung dan meningkatkan kemajuan pertumbuhan ekonomi dalam skala regional dengan lebih berkembang serta meningkatkan kemajuan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini berawal dari hasil penelitian adalah menggunakan metode penelitian yuridis normative dan kajian yang dianalisis ini berawal sejak 1 Januari 2010, negara China dipastikan telah bergabung dalam kesepakatan *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA), pada *Framework Agreement on comprehensive Economic Co-opration Between The Association of South East Asian Nation and The People's Republic of China* (Asean-China) dan telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia waktu itu Megawati di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Novenber 2002, serta telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No.48 Tahun 2004, dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Oleh karena itu, dasar hukum berlakunya kesepakatan perdagangan regional dalam ketentuan *World Trade Organization* atau WTO diperbolehkan dalam pasal 24 GATT, dengan beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri terhadap dampak negatif dari pelaksanaan perdagangan bebas regional, sesuai dengan prinsip transparansi, kejujuran dan harus ditetapkan dalam satu kaidah.

Kata Kunci: kebijakan pemerintah;perdagangan regional; industri dalam negeri.

Mosgan Situmorang

Problematika Merehabilitasi Kedudukan Orang yang Tersangkut Pidana pada Keadaan Semula

Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Volume 19, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 151-170

Rehabilitasi dalam konteks hukum pidana adalah kata yang cukup populer. Kata ini digunakan utamanya dalam hal pemulihan kedudukan atau jabatan seseorang yang kehilangan kedudukan atau jabatannya karena tersangkut masalah pidana, tetapi sering juga digunakan dalam konteks pidana narkotika khususnya rehabilitasi untuk pecandu. Dalam konteks hak seseorang untuk mendapatkan kembali kedudukannya, rehabilitasi berarti pemulihan orang tersebut untuk dapat kembali menduduki jabatan semula atau dalam keadaan semula. Kedudukan dalam hal ini mempunyai arti yang luas dapat berupa jabatan, ataupun posisi berupa pekerjaan status mahasiswa, pelajar dan lain lain. Rehabilitasi diatur dalam banyak perundang-undangan, mulai dari Udang-Undang Dasar RI 1945 dan beberapa undang Undang organik, seperti Undang-Undang Kehakiman, KUHAP, Undang-Undang ASN, PP Nomor 27 tahun 1983 dan peraturan lainnya. Rehabilitasi diberikan kepada seseorang pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Putusan berupa rehabilitasi dari hakim harus ditindak lanjuti lebih lanjut oleh pihak lain agar rehabilitasi itu dapat berjalan efektif. Dalam praktek pelaksanan rehabilitasi ini sering terkendala, karena posisi atau jabatan seseorang sudah terlanjur diisi oleh orang lain selama proses hukum belangsung atau secara nyata kedaan semula tidak dapat lagi dipulihkan seperti kedaan semula. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dipandang perlu untuk melakukan suatu penelitian. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah "mengapa rehabilitasi kepada kedudukan atau jabatan semula sulit dilaksanakan." Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam pelaksaan rehabilitasi. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam rangka mengambil kebijakan maupun dalam rangka penyempurnaan regulasi terkait rehabilitasi. Metode yang digunakan adala normatif yuridis. Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa terdapat beberapa kendala baik yang bersifat regulasi maupun teknis dalam pelaksanan rehabilitasi. Saran yang dapat diberikan adalah agar dibuat regulasi berupa petujuk teknis pelaksanaa rehabilitasi tersebut agar semua pihak terkait dapat melaksanakannya sesuai dengan peran masing masing.

Kata Kunci: rehabilitasi pada kedudukan semula.

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Teresia Din

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Terindikasi Tindak Pidana

Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Volume 19, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 171-183

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang sedemikian besar, dan luas tanah yang relatif tidak bertambah, secara nyata hal ini menyebabkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat, sehingga menyebabkan berbagai masalah pertanahan muncul. Untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut maka mekanisme pemindahan hak atas tanah agar bisa didaftar harus dibuktikan dengan akta Notaris. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana notaris dalam kedudukannya selaku Pejabat Umum terhadap akta otentik yang terindikasi tindak pidana? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan isi perjanjian dalam sebuah akta yang dilanggar oleh salah satu pihak melakukan perbuatan wanprestasi oleh Pihak Kedua, yang menyebabkan dibatalkannya akta tersebut, bukanlah menjadi tanggung jawab Notaris, tetapi tanggung jawab para pihak yang mengikatkan diri untuk melaksanakan prestasi. Aspek perlindungan hukum bagi Notaris yang bersinggungan dengan pranata hukum pidana dan perdata lebih bersifat ekstern, artinya bahwa Notaris selaku Pejabat Umum kepadanya melekat hak-hak istimewa sebagai konsekuensi predikat kepejabatan yang dimilikinya. Istilah hak Istimewa dalam bidang hukum adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintah atau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku. Hak-hak istimewa yang dimiliki Notaris, menjadi pembeda perlakuan (*treatment*) terhadap masyarakat biasa. Bentuk-bentuk perlakuan itu berkaitan dengan suatu prosedur khusus dalam penegakan hukum terhadap Notaris, yakni berkaitan dengan perlakuan dalam hal pemanggilan dan pemeriksaan pada proses penyidikan dan persidangan, yang harus diindahkan

Kata Kunci: notaris; akta otentik; tindak pidana.

Muhaimin

Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan

Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Volume 19, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 185-206

Menurut pendorong nilai keadilan, hukum selama ini bergerak cepat dan lebih tajam apabila kasus hukum terkait dengan orang kecil dan mempersoalkan kepentingan orang besar, termasuk pemilik kekuasaan. Namun apabila sebuah kasus yang mengaitkan atau yang diduga tertuduh pelakunya adalah orang-orang besar dan kekuasaan, maka hukum seolah-olah lumpuh dan tumpul. Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan, yang menjadi persoalan dan tantangan saat ini adalah, bagaimana mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memenuhi tujuan hukum yakni mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan utamanya yuridis normatif. Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Peradilan pidana tidak sekedar dilihat sistem penanggulangan kejahatan, melainkan dilihat sebagai *social* problem yang sama dengan kejahatan itu sendiri. Pelaksanaan sanksi pidana perlu dihubungkan dengan kebijakan pembangunan manusia yang ingin membentuk manusia Indonesia Seutuhnya. Penggunaan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Di samping itu pidana dimanfaatkan untuk menumbuhkan kesadaran bagi si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat. mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pembaruan hukum di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif masyarakat Indonesia yang menjunjung nilai-nilai hukum agama disamping hukum tradisional sehingga perlu digali produk hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan keagamaan. Penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan dapat ditempuh dengan mediasi penal disebut pendekatan *restorative justice,* yaitu menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dengan memaknai tindak pidana. Keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum di Indonesia.

Kata Kunci: keadilan restoratif; tindak pidana ringan; penyelesaian

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Ayup Suran Ningsih

Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Volume 19, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 207-215

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Anti Monopoli) merupakan dasar kebijakan persaingan usaha di Indonesia. Undang-Undang Anti Monopoli memiliki sistem pengaturan yang khas dalam menyikapi hubungan persaingan usaha dan usaha kecil. Kebijakan dan hukum persaingan usaha di Indonesia berpihak kepada UMKM. Semua tindakan pelaku UMKM dikecualikan oleh Pasal 50 huruf h Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Undang-Undang tersebut juga melarang pelaku usaha besar untuk menggunakan kekuatan pasarnya untuk menghambat pelaku usaha lain (termasuk UMKM) ataupun melakukan praktek lain yang merugikan. Salah satu tujuan Undang-Undang ini yaitu menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana implikasi atas pengecualian tersebut terhadap pelaku usaha kecil, pelanggaran-pelanggaran apasaja yang potensial dilakukan oleh pelaku UMKM dalam hal persaingan usaha, serta bagaimana pengawasan terhadap pelaku UMKM di negara lain. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sociolegal*. Metode ini merupakan penelitian empiris dan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian menghubungkannya dengan kenyataan atau fakta yang ada di lapangan (masyarakat). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengecualian kepada pelaku usaha kecil tidak boleh bersifat mutlak atau absolut (*absolute*), harus tetap dilakukan pengawasan oleh lembaga-lembaga terkait. Pengecualian tidak menjamin pelaku usaha kecil tidak berbuat curang atau nakal dalam bersaing. Pengecualian tersebut memiliki implikasi positif yaitu bertambahnya jumlah pelaku UMKM dan implikasi negatif yaitu pelaku UMKM tidak ingin menjadi pelaku usaha besar. Pelaku UMKM berpotensi untuk melakukan pelanggaran dalam hal persaingan usaha seperti penetapan harga, boikot, pembagian wilayah, perjanjian dengan pihak luar negeri, dan perjanjian tertutup. Thailand menjadi negara yang bisa dijadikan contoh dalam pengembangan dan pengawasan UMKM. Thailand memiliki sistem pengembangan UMKM yaitu *one tamboon one product*. Thailand memiliki beberapa lembaga untuk UMKM seperti *Office of Small and Medium Enterprises Promotion* (OSMEP), *Institute for Small and Medium Enterprises Development* (ISMED), *Competition Commission*, dan Bank khusus untuk UMKM, serta pemerintah pusat dan daerah.

Kata Kunci*:* Hukum persaingan usaha; monopoly; persaingan usaha tidak sehat; implikasi undang-undang nomor 5 tahun 1999; UMKM.

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Taufik H. Simatupang

Mendudukkan Konsep *Executive Review* dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia

Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Volume 19, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 217-229

Peraturan perundang-undangan yang belum tertata dengan baik mengakibatkan banyak yang tidak harmonis dan tidak sinkron, baik secara vertikal maupun horizontal. Hal ini memunculkan konsep *executive review* sebagai jalan keluarnya. Persoalannya, lembaga negara mana sesungguhnya yang berwenang. Penelitian ini akan menjawab bagaimana aspek hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dan kedudukan *executive review* dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Aspek hukum pembentukan peraturan perundang-undangan harus memuat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Analisis dan evaluasi hukum merupakan bagian dari konsep pengujian peraturan perundang-undangan yang penting dalam sistem ketatanegaraan negara hukum. Pengujian dilakukan dengan menilai apakah peraturan yang selama ini telah dikeluarkan dan berlaku telah mencapai tujuan pembentukannya, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut dalam masyarakat. Hasilnya berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan, apakah diubah, dicabut atau tetap. Dalam sistem hukum ketatanegaran Indonesia pengujian sampai kepada pembatalan peraturan perundang-undangan adalah kewenangan lembaga judikatif melalui mekanisme *judicial review*. Oleh karena itu tugas evaluasi dan analisis hukum dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan yang bermuara pada rekomendasi mencabut, merubah dan tetap, kurang tepat apabila menjadi kewenangan lembaga eksekutif. Mengingat hal tersebut akan beririsan dan berbenturan dengan tugas dan kewenangan kekuasaan kehakiman, baik di tingkat Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pemerintah lebih tepat melakukan kewenangan pengawasan regulasi melalui penguatan *executive preview* yaitu pengujian norma hukum sebelum sah mengikat secara umum sebagai produk peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: konsep executive review; sistem hukum ketatanegaraan; Indonesia.

Wulan Pri Handini

Mekanisme Pemungutan Suara *Absentee*: Upaya Perlindungan Hak Pemilih pada Saat Pemungutan Suara

Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Volume 19, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 231-246

Masih kurangnya tingkat partisipasi rakyat dalam pemilu menjadi permasalahan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara demokrasi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai bentuk perlindungan terhadap pelaksanaan hak memilih WNI yang tidak dapat hadir di TPS terdaftar pada saat pemungutan suara. Selain itu akan diteliti juga tentang alternatif pengaturan perlindungan hak memilih warga Negara yang tidak dapat hadir di TPS terdaftar pada saat pemungutan suara di negara lain. Penelitian ini termasuk dalam bentuk penelitian yuridis-normatif, yang mengacu pada norma hukum dalam beberapa peraturan. Penelitian ini juga menggunakan perbandingan komparatif yang dilakukan dengan 9 (sembilan) negara. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak memilih dalam pemilu sebenarnya dijamin oleh konstitusi sebagai hak konstitusional dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara khusus dalam pengaturan tentang pemilu legislatif, baik dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat ketentuan yang didalamnya alternatif mekanisme pemungutan suara bagi masyarakat yang tidak dapat hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tempatnya terdaftar pada saat pemungutan suara baik bagi pemilih di dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan ketidakhadiran pemilih dengan merujuk pada mekanisme yang digunakan di Jerman dengan mekanisme *early voting* bagi pemilih yang karena sesuatu hal tidak dapat berada pada TPS tempatnya terdaftar.

Kata Kunci: absensi; pemilu; pemungutan suara; rakyat.

Jurnal Penelitian Hukum
De Jure
Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:10/E/EPT/2019
Volume 19, Nomor 2, Juni 2019
p-ISSN 1410-5632
e-ISSN 2579-8561

Kata kunci bersumber dari artikel
Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya

Evi Djuniarti

Perlindungan yang Seimbang Para Pihak dalam Pembuatan Akad Murabahah

Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Volume 19, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 247-257

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk akad pembiayaan Murabahah adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank syariah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya, pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari bank syariah untuk kepentingan usaha (bisnis), seperti perluasan pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan, modal kerja, dan lainnya. Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan besaran jumlah yang diperjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak bank syariah. Akad pembiayaan Murabahah, yang seharusnya merupakan bentuk jual beli, adalah suatu hal baru dalam perbankan oleh karena tidak dikenal dalam perbankan konvensional. *Bai' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dalam *baik al-murabahah,* penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu keuntungan sebagai tambahannya.

Kata Kunci: perlindungan yang seimbang; para pihak; akta murabahah.